# BAB II

# PEMBAHASAN TENTANG KEBIJAKAN MILITER RUSIA

## A. Dasar Kebijakan Militer

Konflik di Suriah merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian Negara-negara di dunia umumnya dan khususnya yang menjadi pembahasan saya. Isu mengenai konflik di Suriah ini juga telah menarik perhatian Negara Rusia untuk cepat bertindak menangani isu tersebut, karena Rusia dikenal memiliki hubungan yang baik dengan Suriah khususnya dengan rezim pemerintahan Bashar Al-assad.

 Sebagai pewaris kekuatan Uni Soviet, sampai saat ini Rusia merasa

penting untuk menjadi pemimpin dalam Persemakmuran Negara-Negara bekas Uni Soviet yaitu CIS (Commonwealth of Independent State), Rusia selalu menekankan penguasaan (kontrol pengaruh) terhadap bekas wilayah Uni Soviet,baik yang di kawasan Eropa timur maupun Asia tengah. Wilayah Eropa-Asia (Eurasia) merupakan orientasi geografis (geopolitik) terpenting bagi Rusia. Rusia ingin mendapatkan kembali status great power dan menjadi oposisi dari unilateralisme Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di NATO. Great power akan tercapai apabila Rusia menjalankan politik luar negeri yang waspada terhadap persaingan geopolitik dan mampu mempertahankan wilayah Eurasia. Banyak fakta menunjukkan bahwa keamanan suatu negara bergantung pada efektivitas kebijakan pertahanan negara serta prinsip keamanan yang dianutnya. Pentingnya kebijakan ini adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, kesejahteraan, stabilitas politik, ekonomi, social kultur, dan kepentingan militer. Tiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Penggunaan kekuatan militer khususnya ditentukan atas pandangan sejauh mana tingkat yang mengancam kepentingan nasional tersebut. Kepentingan nasional ini yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan strategi kemananan *National Security Strategic* (NSC). Strategi keamanan Rusia menjelaskan bahwa Federasi Rusia menggunakan elemen-elemen negara yaitu militer, diplomasi, ekonomi, perjanjian internasional, dan alat lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Strategi keamanan membantu dalam mencegah ancaman dari luar. Strategi keamanan ini kemudian di tuangkan dalam sebuah dokumen dan yang paling penting yaitu doktrin militer. Kebijakan militer diwujudkan dalam kebijakan pertahanan yang didasarkan pada doktrin militer. Doktrin militer Rusia dapat dibagi menjadi tiga kategori yang menyangkut kebijakan terhadap kekuatan militer dalam level internal Rusia yang meliputi angkatan darat, laut dan udara dan kebijakan militer eksternal yang menyangkut perlakuan terhadap aliansi contohnya NATO. Doktrin militer Rusia berkonsentrasi pada perang dan pencegahannya, kekuatan bersenjata, persiapan negara dan angkatan bersenjata bila adanya agresi dan cara-cara untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah teritorial. Doktrin tersebut berisi dua pokok panduan yaitu pertama menyangkut kebutuhan akan personel angkatan bersenjata dan peralatan militer, yang kedua tentang penanganan perang/angkatan bersenjata. Doktrin militer Rusia berisi tentang kekuatan militer dan pasukannya. Perkembangan Doktrin Rusia dimulai pada Tahun 1990-an. Setelah Pecahnya Uni Soviet, militer Rusia dilihat dalam pembentukan Oganisasi *Commonwealth of Independent State* (CIS), sebuah organisasi yang berisi dari negara-negara bekas Uni Soviet yang tentunya berada di bawah pengaruh Rusia. CIS merupakan kombinasi angkatan bersenjata dari masing-masing negara-negara anggotanya. Walapun Rusia memiliki peran yang sangat besar, namun organisasi ini tetap memiliki armada persenjataannya sendiri, terpisah dari angkatan bersenjata milik Rusia. Hal ini yang kemudian membuat Rusia merasa perlu untuk merumuskan sebuah doktrin militer yang di sahkan pada tahun 1992.[[1]](#footnote-1) Doktrin inilah yang menjadi awal dari kebijakan Keamanan Rusia, yang berbeda dari kebijakan pertahanan dan keamanan Masa Uni Soviet.

 Pada 1990-an, perkembangan kebijakan militer berisi tentang peran Rusia dalam penyelesaina konflik dan keterlibatannya dalam kerjasama militer dengan CIS ( jaminan untuk warga Rusia di negara CIS lainnya.) jika dibutuhkan dengan penggunanan kekuatan nuklir, penyebaran angkatan darat dan pasukan lain di luar wilayah Rusia, dan persepsi ancaman anti barat.

 Secara spesifik, perkembangan doktrin tahun 1990 disertai dengan makin memburuknya hubungan dengan barat yang digambarkan dengan adanya interfensi barat atas urusan dalam negeri Rusia, terkait dengan adanya blok-blok militer dan aliansi, usaha untuk menghalangi kepentingan Rusia dalam pemecahan masalah keamanan internasional, serta skeptis tentang adanya musuh yang mengelilinginya. NATO dianggap sebagai musuh yang berasal dari luar. Sepanjang tahun 1990 Militer Rusia menyadari bahwa kemampuan angkatan bersenjata haruslah ditingkatkan sebab Rusia dihadapkan pada konflik bersenjata domestik maupun regional.

 Pada Doktrin Militer dan Konsep Keamanan Nasional yang akan diperbaharui tahun 2010, dijabarkan bahwa Rusia akan menggunakan kekuatan nuklir strategisnya terhadap negara-negara yang menjadi ancaman bagi Rusia. Doktrin militer yang berlaku saat ini menekankan peranan militer Rusia dalam memastikan pertahanan negara dan, jika diperlukan, mempersiapkan dan melancarkan perang, meski ditekankan bahwa doktrin tersebut bertujuan defensif. Dalam doktrin tersebut disebutkan bahwa senjata nuklir juga dapat dipergunakan dalam konflik lokal jika dianggap ada ancaman kritis terhadap keamanan nasional.[[2]](#footnote-2)

 Pada tahun 2000, Putin memulai kebijakannya dengan menandatangani dokumen keamananan baru yang kemudian di publikasikan sebagai National Security Concept (NSC) pada januari 2000.[[3]](#footnote-3) Ketika Vladimir Putin mengambil alih sebagai presiden Rusia tahun 2000, ia menghadapi kondisi militer yang vakum yang. Kapal tidak berlayar, pesawat tidak terbang, dan persenjataan tidak dalam keadaan siap pakai. Putin kemudian mengambil tugas utamanya dalam menstabilkan militer rusia. Kebijakan modernisasi militer dalam hal pertahanan dimulai sejak masa pemerintahan presiden Vladimir Putin yaitu berbentuk Doktrin pertahanan Rusia tahun 2000-hingga yang terbaru pada tahun 2010. Doktrin Militer tahun 2000 tersebut berisi tentang dasar kebijakan pertahanan Rusia dan penggunaan senjata nuklir dalam menanggapi penggunaan senjata nuklir atau WMD (Weapon Missile Defense)/ senjata pemusnah massal atas kondisi kritis mengenai situasi keamanan nasional Rusia.

 Doktrin militer membentuk dasar dan bagian-bagian dari kebijakan kemananan nasional dan sebagai sebuah refleksi dari peristiwa masa lalu dan dapat mencerminkan peristiwa yang akan datang melalui analisa yang baik tentang perkembangan esensi dari doktrin militer tersebut. Bab ini akan berkonsentrasi pada doktrin militer yang dikeluarkan pada masa pemerintahan

Presiden Vladimir dan Dmitry medvedev sejak tahun 2000. Lebih lanjut doktrin ini berisi tentang elemen-elemen yang dimaksimalkan oleh Rusia dalam dalam penggunaan militer untuk melawan ancaman terhadap negaranya. Adapun peta doktrin militer Rusia dikeluarkan sebanyak 4 kali antara tahun 2000-2010. Doktrin-doktrin ini berupa dasar dikeluarkannya kebijakan pertahanan Rusia dan upaya Rusia dalam mengatasi ancaman keamanan terhadap negaranya.

 Rusia memiliki doktrin keamanan yang pertama kali dikeluarkan tahun

2000. Doktrin tersebut mengandung penekanan tentang pembalasan nuklir dalam kasus serangan nuklir. Pada April tahun 2000, Rusia mencantumkan bahwa ancaman keamanan Rusia berbentuk : Intervensi dalam urusan internal Federasi Rusia, Adanya upaya untuk mengabaikan kepentingan Rusia dalam

menyelesaikan masalah keamanan internasional, perluasan blok-blok militer dan aliansi, penempatan tentara asing (tanpa sanksi DK PBB) untuk wilayah yang berbatasan dengan Rusia, dan mempersiapkan pasukan bersenjata Rusia yang dapat digunakan di wilayah strategis di luar wilayah Rusia.[[4]](#footnote-4)

 Pada tahun 2003, Doktrin militer Rusia menyebutkan bahwa ancaman

berasal dari: ekspansi NATO dan negara-negara yang memiliki keinginan untuk bergabung dengan NATO, adanya proliferasi senjata pemusnah massal (*mass destructive weapon*). Upaya Rusia untuk memastikan keamanannya jugadituangkan dalam bentuk pemeliharaan kekuatan strategis terhadap agresiterhadap Rusia dan sekutunya serta pasukan Rusia dapat melakukan operasibersenjata di daerah vital yang berhubungan dengan kepentingan nasionalRusia.*[[5]](#footnote-5)*

 Selanjutnya, doktrin yang dikeluarkan pada tahun 2004 mencantumkan

bahwa ancaman berupa: perluasan blok militer (NATO), penempatan pasukan

militer asing dalam wilayah kepentingan Rusia, upaya mengurangi peran Rusia

dalam politik dan keamanan internasional, perluasan NATO ke timur, pengembangan WMD (*Weapon Missile Defence*/senjata pemusnah massal). Doktrin ini juga berisi tentang keinginan Rusia dalam menyaingi kepemimpinan global Amerik Serikat dan upaya untuk mendapatkan kedudukan untuk menyebarkan pengaruhnya (*Sphere of Influence*), keinginan untuk menjadi kekuatan besar untuk menjadi superioritas dalam bidang militer serta reorganisasi struktur militer Rusia.[[6]](#footnote-6)

 Presiden Medvedev menyetujui doktrin militer baru pada tanggal 5 Februari 2010. Doktrin ini memiliki kekuatan hukum sebagai kebijakan Negara dan secara prinsip menentukan keputusan dasar terutama dalam bidang militer. Doktrin 2010 melanjutkan strategi keamanan nasional 2009 yang menyebutkan NATO sebagai "bahaya" karena ekspansi terhadap negara yang berbatasan dengan Rusia. Bahaya lain mencakup pengembangan pertahanan rudal strategis dan presisi konvensional serangan senjata, termasuk rudal jelajah. Doktrin Rusia digunakan untuk melindungi kepentingan Rusia dan menjaga keamanan internasional. Doktrin militer menggambarkan bahaya ancaman utama eksternal Rusia berasal dari potensi kekuatan NATO sebagai fungsi global sehingga Rusia perlu menempatkan infrastruktur militer yang berdekatan dengan batas wilayah Rusia. Dalam doktrin ini, pengembangan WMD yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga masih menjadi dasar dikeluarkannya kebijakan pertahanan Rusia. Oleh karena itu, Rusia mencantumkan upaya untuk memperkuat pasukan asing yang ditempatkan di [[7]](#footnote-7)wilayah yang berdekatan dengan Rusia dan aliansinya serta Rusia bersiap untuk konflik bersenjata di wilayah teritorinya maupun negara yang berdekatan dengan wilayah Rusia serta aliansinya. Selain itu, Rusia memprioritaskan pada kerjasama militer dengan CIS, CSTO, dan SCO. Terdapat pula pernyataan bahwa Serangan atas salah satu anggota aliansi merupakan serangan atas seluruh anggota. Untuk memastikan keamanan negaranya, Rusia juga menjamin adanya interdependensi teknologi terhadap produksi kekuatan militer.

 Selanjutnya, juga terdapat lima prinsip dasar dari Doktrin Pertahanan

Rusia dideklarasikan oleh Presiden Medvedev adalah sebagai berikut :[[8]](#footnote-8)

1. Pertama, Rusia mengakui keunggulan prinsip-prinsip dasar hokum internasional, yang mendefinisikan hubungan antara bangsa-bangsa beradab. Kami akan membangun hubungan kita dengan negara-negara lain dalam kerangka prinsip-prinsip dan konsep hukum internasional.
2. Kedua, dunia harus multipolar. Sebuah tiang (kekuatan) tunggal tidak dapat diterima. Dominasi adalah sesuatu yang kita tidak bias membiarkan. Kita tidak bisa menerima tatanan dunia di mana satu negara membuat semua keputusan, negara bahkan sebagai Negara berpengaruh seperti Amerika Serikat. Hal seperti ini membuat dunia tidak stabil dan terancam konflik.
3. Ketiga, Rusia tidak ingin konfrontasi dengan negara manapun. Rusia tidak berniat mengisolasi dirinya sendiri. Kami akan mengembangkan hubungan persahabatan dengan Eropa, Amerika Serikat dan negaranegara lain sebanyak mungkin.
4. Keempat, melindungi kehidupan dan martabat warga negara kita, di mana pun mereka mungkin berada merupakan prioritas yang utama untuk negara kita. Keputusan kebijakan luar negeri kita akan didasarkan pada kebutuhan ini. Kami juga akan melindungi kepentingan komunitas bisnis kami di luar negeri. Ini harus jelas bagi semua bahwa kami akan menanggapi setiap tindakan agresif yang dilakukan terhadap kita.
5. Kelima, seperti halnya dengan negara lain, ada wilayah-wilayah di mana Rusia telah memiliki "kepentingan istimewa". Ini merupakan daerah asal negara-negara yang kita memiliki hubungan sejarah khusus dan terikat bersama sebagai teman dan tetangga yang baik. Kami akan memberi perhatian khusus untuk pekerjaan kami di wilayah ini dan membangun hubungan bersahabat dengan negara-negara ini, tetangga dekat kami.

## B. Tujuan Kebijakan

Doktrin militer Rusia (tahun 2000) tampaknya menjadi upaya Rusia serius untuk mendefinisikan kembali tatanan internasional yang ada yang telah

dikeluarkan oleh Rusia yang menjadi pengambilan keputusan strategis sejak 1991. Melalui Doktrin Militer, Rusia tampaknya berniat kembali mengklaim statusnya sebagai negara adidaya dan penyeimbang kepentingan di wilayah dalam system mandala Eropa. Dari isi Doktrin Pertahanan diatas, dapat dilihat bahwa Rusia menginginkan adanya pembagian pengaruh yang tidak didominasi oleh kekuatan unipolar (Amerika Serikat dan sekutunya) dan berupaya mengimbangi dengan membentuk sistem dunia multipolar.[[9]](#footnote-9)

 Tujuan kebijakan pertahanan Rusia direfleksikan dalam doktrin militer

untuk mencapai kepentingan nasional. Hal ini mencakup upaya masuk dalam komunitas global. Contohnya yaitu dengan menjalin kerjasama keamanan dengan negara anggota CIS dengan membentuk CSTO (Collective Security Treaty Organization) dan SCO (Shanghai Corporation Organization) dan memastikan keamanan militer kolektif. Rusia dengan kebijakan militernya berusaha mendapatkan pengaruh atas negara-negara anggota CIS.

 Dalam Orenburg pada tanggal 26 September 2008, Presiden Rusia Dmitry Medvedev bertemu dengan komandan distrik militer, dalam pertemuan itu, tercapai 5 visi dalan upaya mereformasi peralatan konvensional[[10]](#footnote-10), yaitu:

1. Meningkatkan organisasi dan struktur kekuatan dengan mengubah semua semua divisi dan brigade untuk brigade kesiapan permanen, menghapuskan prinsip mobilisasi massa dan meninggalkan system berbasis divisi.
2. Meningkatkan efisiensi dan kontrol keseluruhan komando.
3. Meningkatkan sistem pelatihan personil, termasuk pendidikan militer dan ilmu militer.
4. Melengkapi angkatan bersenjata dengan sistem senjata terbaru dan asset intelijen, terutama teknologi tinggi, dalam rangka untuk "mencapai superioritas angkatan udara, memberikan serangan presisi pada angkatan darat dan target maritim, dan memastikan penyebaran kekuatan operasional.”
5. Meningkatkan status sosial personel militer, termasuk membayar dan tunjangan, perumahan, dan kondisi kehidupan sehari-hari serta analisis yang cermat tentang struktur asing, termasuk NATO.

Berikut beberapa organisasi militer yang melibatkan Rusia dan Negara-negara tetangganya.

**Organisasi di Wilayah Teritori bekas Uni Soviet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Organisasi | Tahun Dibentuk | Negara Anggota | Bidang | Orientasi |
| CIS (Commonwealth ofIndependet State) | 8 Desember1991 | 11 negara (setelah Ukrainadan Georgia mengundurkandiri)dan 1 negara pengamat(mongolia) | Politik-ekonomi militer | Integrasi,pro-Rusia |
| Organisasi PaktaPertahanan Kolektif(Organizatsiya dogovorao kolektivnoybezopasnosti-ODKB) | 23 September2003 | Armenia, Belorusia,Kazakhstan, Kirgiszia, Rusia,Tadjikistan, Uzbekistan | Militer (organmiliter CIS) | Pro- Rusia |
| Shanghai CooperationOrganisation(Shanghayskoe WOC) | 15 Juni 2001 | Cina, Rusia, Tadjikistan,Kirgiszia, Uzbekistan,Kazakhstan, kecualiUzbekistan, kelima negaradiatas tergabung dalamShanghai-five | Militer | Pro-Rusia |
| EURAZEC | 10 oktober 2000 | Belorusia, Kazakhstan,Kirgiszia, Rusia, Tadjikistan,dan Uzbekistan. Negarapengamat: Moldavia, Ukraina, dan Armenia | Ekonomi | Pro-Rusia |
| GUAAM (Georgia,Ukraina, Uzbekistan,Armenia, Moldavia) | 1997 | Georgia, Ukraina,Uzbekistan, Azerbaijan,Moldavia, Azerbaijan keluartahun 1999, sehingganamanya menjadi GUAM | EkonomiPolitik | Pro-Barat |
| Ruang Ekonomi Tunggal(Yedinoeekonomicheskoyeprostranstvo-EEP) | 19 sep 2003 | Rusia, Belorusia, Ukraina,Kazakhstan, Sejak naiknyaViktor Yushenko menjadiPresiden, Ukraina membatasikeikutsertaan dalamorganisasi ini. | Ekonomi | Pro-Rusia |
| Proyek Uni Eurasia | Dalam prosespembentukan | Belorusia, Kazakhstan,Kirgiszia, Rusia danTadjikistan | Politik,Ekonomi,militer,humaniora,budaya | Pro-Rusia |
| Persemakmuran PilihanDemokratis | Desember 2005 | Ukraina, Moldavia, Latvia,Lithuania, Estonia, Polandia,Slovenia, Macedonia,Rumania, dan Georgia |  | Anti- Rusia |
| Pemerintahan Uni-Rusia-Belorusia | 26 januari 2000 | Rusia-Belorusia | Politik,hukum,ekonomi,sosial,humaniora,dll | Reintegrasi-Pro Rusia |

(Sumber: S.G. Luzyanin (2007), K.S. Gadjiev (2001,2007) (Glasnost Vol 4 No 2 Oktober 2008-Maret 2009 hal 21-22

1. Deputy of Commonwealth of Independent States (CIS). May 2007.

<http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/cis.pdf>. Diakses tanggal 25-04-2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. Suara Media. *Doktrin militer Rusia siap jungkir balikkan NATO.*

[http://www.suaramedia.com/berita-dunia/eropa/11993-doktrin-militer-rusia-siap-jungkirbalikkan-serbuan-nato.html#](http://www.suaramedia.com/berita-dunia/eropa/11993-doktrin-militer-rusia-siap-jungkirbalikkan-serbuan-nato.html). Diakses tanggal 25-04-2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. Arms Contol Association. 2000. *Russia’s National Strategy.*

Concepthttp://www.armscontrol.org/act/2000\_01-02/docjf00. Diakses tanggal 25-04-2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. Main External Security Entries in Military Doctrine Documents (2000-2010). [↑](#footnote-ref-4)
5. *ibid* [↑](#footnote-ref-5)
6. *ibid* [↑](#footnote-ref-6)
7. *ibid* [↑](#footnote-ref-7)
8. Dr. Subhash Kapila, *Op.Cit* [↑](#footnote-ref-8)
9. Skripsi “Kebijakan Pertahanan Rusia Terhadap NATO” disusun oleh Sri Rahyuni, FISIP Universitas Hasanudin 2012 [↑](#footnote-ref-9)
10. Roger N. McDermott**.** November 2011. *Russia’s Conventional Armed Forces; Reform*

*and Nuclear Posture To 2020.* Russian Nuclear Weapons Past, Present and Future. United States:

SSI. Page 34 [↑](#footnote-ref-10)